Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Jumadiah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract

Marriage is one of elementary institution (basic institution) in law of Islam family, marriage is agreement which born from desire of a men and woman to coexist in tying akad. Marriage do not only have a meaning of the civil agreement, but also agreement owning meaning spiritual, later on will generate the rights and obligations of among/between spouse well-balancedly, however everybody do not can form an family which is is dreamed of the. Marriage can break and end because several things, that is because the happening of divorce which is is knocked down by husband to its wife, or because divorce that happened among/between both. Delivering birth nya of PERMA number 1 Year 2008 about Mediasi can assist the process of is solving of dispute of among/between spouse to obtain; get the agreement of the parties assistively by mediator. Mediasi one of process is solving of cheap and quicker dispute, and also can give to access the larger ones to the parties find the satisfying solution and fulfill sense of justice.

Keywords : *Solving of Divorce Case, Through/ Passing Mediasi.*

I. LATAR BELAKANG

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan yang memenuhi unsur-unsur dan syaratnya, sehingga membentuk sebuah rumah tangga.¹

Setiap orang yang melakukan perkawinan menghendaki kehidupan

rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama yang diatur dalam aturan hukum (*syari'at*), antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).²

¹ Yani Tri Zakiyah, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, Google, <<http://www.docstoc.com/docs/48141877/>>, 11:17:15 GMT. Akses tanggal 21 Oktober 2011.

² Neliati, *Utang Piutang Dalam Rumah Tangga dan Pembagiannya akibat perceraian*, Google, <<http://www.palubupakam.net/component/content/article/1>>

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, baik dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non muslim maupun di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.³ Dalam sebuah rumah tangga bila terjadi perselisihan yang sangat prinsipil dan membahayakan keutuhan rumah tangga, serta tidak diselesaikan sendiri, lebih baik menunjuk seorang penengah yang bersikap netral dan arif untuk membantu memecahkan perselisihan tersebut, akan tetapi jika perselisihan tersebut sudah mencapai tingkat klimaks (keadaan) yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan, maka upaya terbaik untuk menyelesaikannya yaitu melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkaranya.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 didalam Pasal 39 ayat 1 dinyatakan : perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya ayat 2 dikatakan bahwa apabila suami ingin menceraikan istrinya atau seorang istri mengajukan gugatan cerai maka ia harus mempunyai alasan yang cukup, bahwa mereka tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan Pasal 40 ayat 1 memuat

bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

Pada umumnya, perkara perceraian bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam urusan rumah tangga di antara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan bentuk penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara), para pihak selalu berupaya menemukan cara-cara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para pihak yang berperkara.

Salah satu realitas sosial yang tidak termuat dalam substansi hukum formal, namun realitas itu merupakan kenyataan-kenyataan sosiologi dan antropologis, adalah kehadiran berbagai cara (mekanisme) atau metode penyelesaian sengketa dalam hidup bermasyarakat. Dalam perspektif penegakan *rule of law*, misalnya setiap sengketa yang prosedur maupun dasar penyelesaiannya sudah terakomodasi dalam instansi hukum formal, dengan sendirinya mekanisme hukum pun harus mengikuti tata cara dan dasar hukum formal yang ada.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan : “alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli”. dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak

94.html. 16:30:02 GMT. Akses tanggal 20 September 2010.

³ Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 1990, hlm. 65.

pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak

Hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.⁴

Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, mediator harus secara layak memenuhi kualitas tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa.⁵ Dengan bekal berbagai kemampuan yang

dimilikinya, mediator mendiagnosis suatu sengketa tertentu, mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat.⁶ Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi mulai diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2009, namun belum ada pembukuan, akan tetapi pada tahun 2010 sudah ada pembukuan.

Menyikapi masalah tersebut, maka melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, penyempurnaan terhadap Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008, setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 130 HIR/ 154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim tersebut. selanjutnya Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa : Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial,

⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 82.

⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 133.

⁶ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 89.

keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini ialah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?
- 2) Apa Penyebab Kegagalan Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?

II. PEMBAHASAN

2.1 Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus diajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iah) setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila pergaulan kedua suami dan isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami dan isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut: " Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda " Sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq" (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah). Adapun tujuan Perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun

demikian talaq masih tetap di benci Allah.

Proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) dalam proses mediasi di pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Sengketa berarti terjadinya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang saling terkait. Baik antara pihak suami dengan isteri dalam hubungan keluarga. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh suami dan isteri. Dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga, namun dalam proses menjalin hubungan suami isteri dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan terjadinya pertentangan, perselisihan atau sengketa antara suami isteri dalam rumah tangga. Jadi yang dimaksudkan dengan perselisihan dalam bidang al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga) meliputi masalah perkawinan mengenai perkara perceraian adalah sengketa didalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat hubungan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga.

Musyawarah atau perdamaian selalu menjadi tujuan utama dalam setiap menyelesaikan sengketa. Hal ini telah lama diatur baik dalam kitab suci Al-Qur'an maupun peraturan perundangan yang berlaku. Kitab suci Al-Qur'an telah mengisyaratkan supaya menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian adalah merupakan cara-cara yang terbaik yang

dikehendaki oleh Allah SWT. Karena cara-cara/jalan tersebut lebih mendatangkan manfaat dan ketenangan bagi pihak-pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian dalam dunia hukum positif sering disebut dengan istilah “*mediasi*”.

Tahap pramediasi adalah tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan tercapainya titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.

Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung, selama dalam proses perundingan-perundingan mediator harus tetap bersikap netral, membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.

Berdasarkan hasil penelitian

bahwa hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 154 (1) Rbg/Pasal 130 HIR jo. Perma No. 1 Tahun 2008, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara wajib menyelesaikan perkaranya secara damai melalui mediasi, sebagai langkah awal, Hakim Ketua Majelis menyarankan kepada para pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman para mediator.

Faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain karena tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, cemburu, krisis akhlak, kekejaman jasmani, kekejaman mental, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, dan lain-lain.⁷

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : WI-A5/272/PW.09.01/XI/2010.

Mediator yang terdaftar di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ada 6 (enam) orang, yaitu :

1. Drs. H. Burhanuddin Harahap, SH
2. Drs. H. Abu Bakar Ubit
3. Drs. T. Syarwan
4. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag
5. Fakhurrazi, S.Ag
6. Muhammad Ismet, S.Ag

Pasal 5 huruf b ditentukan bahwa; Jika dalam wilayah Pengadilan tidak ada hakim, advokat,

akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Pasal tersebut dijelaskan, bahwa siapa-siapa saja yang berhak menjadi mediator yaitu hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, semuanya itu harus mempunyai sertifikat selaku mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau seandainya belum ada yang mempunyai sertifikat mediator, maka hakim boleh bertindak sebagai mediator sekalipun belum mempunyai sertifikat mediator.

Mediasi dilaksanakan ketika kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Mediasi dipimpin oleh seorang mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak atau kedua belah pihak menyerahkan untuk memilihnya kepada majelis hakim. Kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan tentang penunjukan mediator. Setelah adanya mediator, maka pihak-pihak yang bersengketa menghadap mediator yang telah ditunjuk untuk menentukan pelaksanaan hari mediasi. Dalam pertemuan mediator dan para pihak yang bersengketa bersepakat kapan pertemuan akan dilaksanakan, apabila mediasi telah selesai dilaksanakan, maka mediator melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim yang telah menunjuknya sebagai mediator.⁸

Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe saat ini baru menggunakan mediator

⁷ Sabri, Panitera Muda Gugatan Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Wawancara tanggal 21 Oktober 2011.

⁸ Fitriyel Hanif, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Wawancara tanggal 5 Januari 2011.

dari kalangan hakim, karena mediator di wilayah Lhokseumawe belum ada yang bersertifikasi, dalam pelaksanaannya apabila pertemuan pertama sudah terjadi perceraian dengan talak 3 (tiga) dikampung, maka proses mediasi cukup 1 (satu) kali pertemuan itu saja dan mediasi dinyatakan gagal, tetapi kalau dalam pertemuan pertama tersebut tidak ditemukan telah terjadi talak 3 (tiga) dikampung kemudian perselisihan belum begitu memuncak, maka proses mediasi dilakukan berkali-kali. Kemudian mediator menyatakan gagal dalam mediasi, setelah kedua belah pihak menyatakan tidak perlu dilanjutkan lagi atau menurut pandangan mediator dalam mediasi tidak tercapai titik temu, selanjutnya mediator membuat laporan kepada majelis hakim dan majelis hakim melanjutkan persidangan sesuai prosedur, kalau terjadi perdamaian dan masing-masing menyatakan akan rukun kembali, maka di dalam kasus perceraian dibuatkan surat perjanjian dan surat perjanjian tersebut dituangkan dalam penetapan majelis hakim dan perkara dicabut. Adakalanya dalam proses mediasi tidak tercapai perdamaian untuk rukun kembali, namun dalam proses mediasi tergugat menyatakan bersedia menerima perceraian dengan syarat-syarat tertentu seperti pembagian harta bersama, pengasuhan anak dan lain-lain.⁹

Menurut Bapak Fitriyel Hanif menyatakan, bahwa upaya yang ditempuh oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian adalah :

- 1) Menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi.

Hakim mediator dalam mediasi menghadirkan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak hadir dalam forum mediasi hakim akan bertanya kepada pihak pertama dan pihak kedua apa permasalahan dalam rumah tangga sehingga para pihak ada yang ingin bercerai, setelah permasalahan kedua belah pihak sudah jelas diketahui oleh hakim, maka hakim akan mencari jalan tengah agar para pihak dapat rukun kembali.

- 2) Melakukan interview secara terpisah

Setelah para pihak dipertemukan bersama dalam forum mediasi, maka hakim akan menyarankan kepada pihak tergugat untuk tetap berada di dalam forum mediasi dan pihak penggugat diharapkan menunggu diluar. Setelah pihak tergugat berada di dalam forum mediasi, hakim akan bertanya kepada pihak tergugat apa permasalahan dalam rumah tangga dan apa keinginan yang ingin dicapai dari pihak tergugat.

- 3) Melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing

Hakim dalam forum mediasi sudah mengetahui dengan jelas permasalahan dan keinginan dari kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak sudah menyimpulkan permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai dalam forum mediasi secara tertulis, maka hakim akan mempertemukan

⁹ Husin, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 11 Januari 2011.

kedua belah pihak kembali dalam forum mediasi dan membahas permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak.

- 4) Hakim mediator menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi

Setelah mediasi selesai dilaksanakan dan telah melalui beberapa tahapan dalam mediasi seperti menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan interview secara terpisah, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginannya masing-masing secara tertulis, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing, maka hakim mediator dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan mediasi apakah berhasil atau tidak.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida Surya (Istri), menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan mediasi dilangsungkan para pihak disarankan agar berunding guna memilih mediator, akan tetapi para pihak gagal memilih mediator, namun para pihak telah memberitahukan kegagalan dalam memilih mediator kepada majelis hakim, karena para pihak tidak memilih sendiri mediator, maka majelis hakim menunjuk Bapak Fitriyel Hanif sebagai mediator sesuai daftar mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

2.2 Penyebab Kegagalan Proses Penyelesaian Perkara

¹⁰ Fitriyel Hanif, Hakim Mediator Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 14 Februari 2011.

Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 130 HIR/154 Rbg adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Namun harapan Mahkamah Agung tersebut nampaknya belum dapat direalisasikan dengan sempurna dalam praktek, sehubungan dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan adanya kegagalan proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sehingga proses mediasi tersebut tidak efektif.

Faktor-faktor yang menyebabkan proses mediasi gagal dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe disebabkan oleh beberapa faktor yaitu;

- 1) Penggugat Tidak Datang Menghadap Forum Mediasi

Apabila Penggugat tidak datang menghadap forum Mediasi, maka Hakim Mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang dilakukan proses Mediasi, karena yang berperkara hanya satu pihak saja yang hadir, karena tidak adanya keseriusan dalam menjalani proses Mediasi, maka proses Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator.

- 2) Tergugat Tidak Datang Menghadap Forum Mediasi

Apabila pihak Tergugat tidak datang menghadap forum Mediasi, maka Hakim Mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang

dilakukan proses Mediasi, karena yang berperkara hanya satu pihak saja yang hadir, maka proses Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator.

- 3) Penggugat dan Tergugat Memegang Prinsip Masing-masing tanpa ada yang mau mengalah

Apabila setelah diberikan arahan kepada Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap mempertahankan prinsip masing-masing tanpa ada yang mau mengalah, yaitu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena tidak tercapainya kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali dalam forum mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator.¹¹

Menurut Bapak Husin, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan proses mediasi gagal dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, antara lain :

- 1) Sebelum perkara masuk ke pengadilan pada umumnya persoalan rumah tangga terlebih dahulu sudah ditangani oleh orang tua kampung, setelah tidak berhasil didamaikan oleh orang tua kampung baru diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Sebelum salah satu pihak berkeinginan untuk mengajukan proses perceraian ke Pengadilan, tentu para pihak telah

mengadakan upaya perdamaian, misalnya dengan menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi kepada orang tua kampung dan perangkat desa yang bertujuan untuk mencari solusi agar permasalahan tersebut tidak sampai ke Pengadilan dan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, namun pada musyawarah ini sudah tidak tercapainya kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali diantara Penggugat dan Tergugat, setelah tidak berhasil didamaikan oleh orang tua kampung baru diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, namun setelah diberikan arahan kepada Penggugat dan Tergugat dalam forum Mediasi, ternyata tidak tercapai perdamaian, karena Penggugat tetap ingin bercerai dan Penggugat tidak bersedia lagi untuk dilanjutkan Mediasi pada kesempatan berikutnya, maka proses Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator.

- 2) Sudah terjadi talak 3 (tiga) dikampung

Apabila dalam rumah tangga sudah terjadi talak 3 (tiga) antara suami dan isteri dikampung, maka para pihak sudah tidak mungkin disatukan lagi, karena bila perkara sudah masuk ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka perkara perceraian antara suami dan isteri sudah tidak bisa rujuk lagi dan apabila para pihak ingin rujuk kembali, maka pihak isteri harus kawin terlebih dahulu dengan orang lain, agar mantan suaminya bisa membina rumah tangga kembali dengan mantan isterinya, setelah isterinya

¹¹ Fitriyel Hanif, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Wawancara tanggal 17 Januari 2011.

menceraikan suaminya yang dinikahinya sewaktu diceraikan dengan talak 3 (tiga) dikampungnya. Apabila dalam pertemuan pertama sudah terjadi perceraian dengan talak 3 (tiga) dikampung, maka akan menimbulkan efek samping dari perceraian sudah tidak bisa rujuk lagi, oleh sebab itu proses mediasi cukup 1 (satu) kali pertemuan itu saja dan mediasi dinyatakan gagal oleh mediator.¹²

- 3) Persoalan rumah tangga/kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah dibawa ke kantor polisi

Apabila dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada kerukunan akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak serta persoalan rumah tangga/kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara Penggugat dan Tergugat sudah dibawa ke kantor polisi, maka perkaranya sudah sulit untuk di mediasi dan para pihak sudah susah untuk memaafkannya, sehingga diyakini rumah tangga tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, namun setelah diberikan arahan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak tercapai perdamaian dalam forum Mediasi, karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dan Penggugat tidak bersedia lagi untuk dilanjutkan Mediasi pada kesempatan berikutnya. Oleh karena itu Mediasi dinyatakan gagal oleh hakim mediator.

- 4) Faktor pihak ketiga adakalanya dari pihak keluarga adakalanya salah satu pihak sudah mempunyai calon pasangan lain

Apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada kerukunan akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta adanya gangguan dari pihak ketiga adakalanya dari pihak keluarga adakalanya salah satu pihak sudah mempunyai calon pasangan lain, sehingga menyebabkan perbedaan prinsip/salah paham diantara Penggugat dan Tergugat, maka perkaranya sudah sulit untuk di Mediasi dan para pihak sudah susah untuk memaafkannya, sehingga diyakini rumah tangga tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, namun setelah diberikan arahan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak tercapai perdamaian dalam forum Mediasi, karena Penggugat tetap ingin bercerai dan Penggugat menyatakan tidak perlu lagi pertemuan lanjutan untuk Mediasi, maka mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator.¹³

Proses negosiasi yang ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dianggap tidak mampu untuk mewujudkan rasa keadilan yang didambakan oleh para pihak, dengan menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi kepada orang tua kampung dan perangkat desa, dengan maksud agar

¹² Husin, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 26 Januari 2011.

¹³ Husin, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 26 Januari 2011.

orang tua kampung dan perangkat desa tersebut memberikan pengarahan-pengarahan yang bertujuan untuk mempersatukan mereka kembali.¹⁴

III. PENUTUP

Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dilaksanakan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi dalam pelaksanaannya bahwa mediator yang terlibat dalam lingkungan Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe belum mempunyai sertifikat sebagai mediator, namun demikian pelaksanaan mediasi, mediatornya ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe.

Faktor-faktor yang menyebabkan proses mediasi gagal dalam perkara perceraian adalah faktor tidak hadirnya para pihak dalam forum mediasi, tidak adanya keinginan dari para pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, adanya tindakan KDRT sebelum perkara perceraian diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang belum memiliki sertifikat mediator agar segera memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disarankan kepada Hakim Mediator dan para pihak agar dapat menjalankan mediasi dengan itikad baik, sehingga

memudahkan para pihak tercapainya kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga melalui forum mediasi agar tidak dirugikan bila nantinya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga.

Hakim Mediator untuk lebih meningkatkan pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar dapat mengurangi penumpukan perkara perceraian dan untuk mencapai penyelesaian perkara yang memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Abbas, syahril, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa Takut*, Restu Agung (Anggota IKAPI . Jakarta – Indonesia), Jakarta, 2006.
- Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman*

¹⁴ Rosliana Binti Ghazali, Bekas Istri, *Wawancara* tanggal 15 Maret 2011.

- Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Project, Jakarta, 1993.
- Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Proyek Elips, Jakarta, 1999.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006,
- Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- John Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, cet ke XXV Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, 2002.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1981.
- Suyud, Margono, *ADR & ARBITRSE (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

INTERNET.

Yani Tri Zakiyah, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, Google, <<http://www.docstoc.com/docs/48141877/>>, 11:17:15 GMT.

Neliati, *Utang Piutang Dalam Rumah Tangga dan Pembagiannya akibat perceraian*, Google, <<http://www.palubukpakam.net/component/content/article/194.html>>. 16:30:02 GMT.